

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi per tahun antara 4,5 – 5,2 persen. Dalam konteks tersebut, upaya reformasi bidang pembangunan mutlak dilakukan. Salah satu fokus utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat stabilitas nasional, termasuk menciptakan lebih banyak peluang kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran. Pengangguran tidak hanya berdampak pada individu dan rumah tangga, tetapi juga memiliki implikasi besar terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan kesejahteraan. Untuk mencapai tujuan ini, pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran dalam pertumbuhan ekonomi bergantung pada peningkatan faktor-faktor produksi seperti jumlah penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal (Edo Permadi, 2021)

Pertama, jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan jika diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Namun, jika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang cukup, akan menyebabkan peningkatan pengangguran, yang pada gilirannya menghambat pembangunan ekonomi.

Kedua, tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi mencerminkan lebih banyak penduduk yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, jika tidak diiringi dengan kualitas pekerjaan yang baik dan pengurangan pengangguran, maka manfaat partisipasi tersebut tidak akan optimal.

Ketiga, kebijakan upah minimum yang tepat dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendorong produktivitas. Namun, jika tidak disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja, kebijakan ini bisa mengakibatkan peningkatan pengangguran, terutama di sektor informal dan usaha kecil.

Terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi menunjukkan bahwa penduduk memiliki akses yang baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang layak. IPM yang tinggi seringkali berkorelasi dengan kemampuan penduduk untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, yang pada akhirnya mengurangi tingkat pengangguran dan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan menganalisis pengaruh jumlah penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum, dan indeks pembangunan manusia terhadap pengangguran terbuka memberikan wawasan penting tentang bagaimana kebijakan ekonomi dan sosial dapat disusun untuk mendukung pembangunan ekonomi yang lebih baik dan mengurangi pengangguran. Faktor-faktor lain menjadi penentu kesejahteraan masyarakat meliputi ketersediaan fasilitas listrik dan air bersih memadai, aksesibilitas pendidikan, tingkat kesehatan serta ketersediaan fasilitas medis, kondisi perumahan bagi masyarakat kurang

mampu, dan tercapainya kemajuan infrastruktur. Faktor penentu kesejahteraan Masyarakat antara lain pada ketersediaan utilitas dasar (*basic utilities*), akses pendidikan, keterjangkauan sarana kesehatan, prasarana perumahan bagi masyarakat prasejahtera serta tingkat ketersediaan infrastruktur (Firda Wati, 2019)

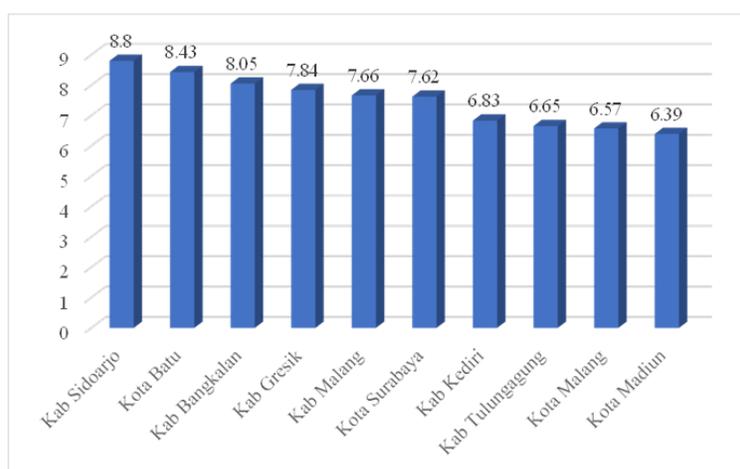
Pertumbuhan ekonomi belum dapat dianggap berhasil jika terdapat beban sosial yang meningkat, peningkatan tingkat pengangguran, distribusi pendapatan tidak merata, dan peningkatan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan. Pengangguran terjadi akibat perubahan tingkat angkatan kerja yang tinggi tanpa diimbangi oleh penyerapan tenaga kerja disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan penciptaan lapangan kerja (Dwi Mahroji, 2019)

Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi tantangan serius terkait masalah pengangguran. Pengangguran dianggap sebagai masalah makroekonomi memiliki dampak langsung pada individu dan dianggap sebagai beban sangat berat. Bagi sebagian besar orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar hidup dan tekanan psikologis. Selain itu, pengangguran juga berkontribusi pada ketidaksetaraan atau kesenjangan distribusi pendapatan di dalam suatu masyarakat dalam negara tersebut. Pengangguran muncul akibat tingginya pertumbuhan dalam angkatan kerja tidak diimbangi oleh ketersediaan lapangan kerja lebih memadai. Pengangguran juga dapat terjadi meskipun peluang kerja tinggi, tetapi terkendala oleh informasi terbatas dan ketidaksesuaian (Iskandar Putong dan Nuring Dyah Andjaswati, 2019).

Berdasarkan data Trading Economy, Indonesia adalah negara dengan tingkat pengangguran tertinggi kedua di Asia Tenggara tahun ini. Tercatat, tingkat pengangguran di dalam negeri mencapai 5,45% pada 2023. Menurut Badan Pusat Statistik, angka pengangguran Indonesia menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 5,83% atau 410 ribu orang.

Jawa Timur sebagai provinsi dengan penduduk sejumlah 41 juta jiwa dengan menempati urutan ke 12 dengan TPT tertinggi di Jawa Timur sebesar 5,49%. Angka tersebut lebih tinggi dari rasio TPT Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Kondisi peningkatan angka pengangguran tidak hanya menjadi masalah, tetapi juga menjadi beban bagi perekonomian, dengan dampak negatif terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1. 1 Kota/Kabupaten dengan TPT tertinggi di Jawa Timur, 2022 (dalam persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur

Data pada Gambar 1.1 menunjukkan Kabupaten Malang menjadi daerah dengan TPT tertinggi kelima di Jawa Timur. Menurut data BPS, Kabupaten Malang termasuk dalam 10 daerah dengan tingkat pengangguran terbuka tinggi, mencapai 97,319 jiwa dari total jumlah angkatan kerja sebanyak 1,481,324 jiwa. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir Kabupaten Malang mengalami fluktuasi atas Tingkat pengangguran terbuka yaitu pada tahun 2019 mencapai 53,312 jiwa, tahun 2020 meningkat menjadi 81,532 jiwa sehingga mengalami peningkatan yang cukup tinggi, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 77,267 jiwa, pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi 90,614 jiwa.

Situasi naik turun jumlah tingkat pengangguran terbuka menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Malang untuk meningkatkan dan menambah lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja bertujuan agar lebih banyak angkatan kerja dapat terserap, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran di daerah tersebut. Sektor unggulan di Kabupaten Malang pada tahun 2022 adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dari sektor pertanian pernah ditemukan fenomena kelangkaan pupuk, kelangkaan terjadi pada beberapa kelompok tani lantaran musim tanam di Kabupaten Malang tidak seragam, ini berbeda dengan kebanyakan musim tanam di daerah lain yang biasanya bersamaan. Kelangkaan pupuk ini membawa dampak cukup besar bagi TPT Kabupaten Malang. Selain itu, sektor pariwisata di Kabupaten Malang juga memiliki potensi sangat besar dengan berbagai destinasi alam dan budaya yang menarik. Pemerintah Kabupaten Malang harus memfokuskan pembangunan pada sektor-sektor ini, karena mereka memiliki potensi besar untuk menciptakan banyak lapangan

pekerjaan bagi masyarakat. Permasalahan yang terjadi adalah di beberapa lokasi wisata, wisatawan kesulitan untuk membeli makanan karena terbatasnya atau bahkan penjual makanan tidak tersedia, oleh karena itu lebih dimaksimalkan faktor penumbuhnya. Misalnya saja jasa penyedia kuliner bisa memberdayakan UMKM (Disnaker Kabupaten Malang,2022)

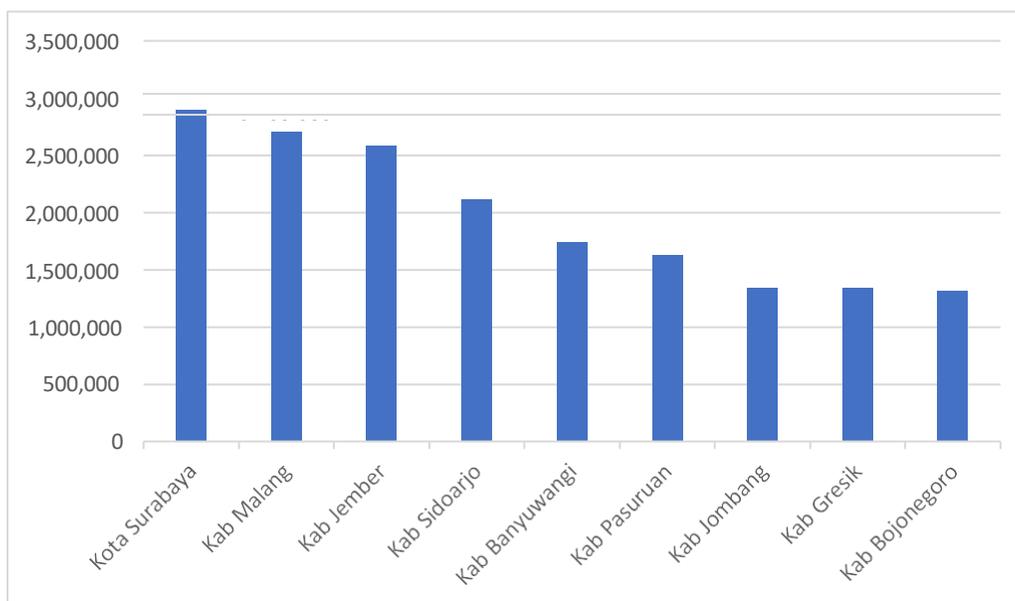
Dengan memaksimalkan pengembangan sektor-sektor unggulan ini, perekonomian Kabupaten Malang akan semakin kuat. Misalnya, investasi dalam teknologi pertanian modern dan praktik kehutanan berkelanjutan dapat meningkatkan hasil panen dan produktivitas, sehingga membuka peluang kerja bagi petani, pekerja hutan, dan teknisi. Di sektor perikanan, pengembangan budidaya ikan dan pengolahan hasil laut dapat menciptakan banyak pekerjaan di sepanjang rantai pasok, mulai dari nelayan hingga pengolah produk ikan.

Selain itu, potensi pariwisata yang melimpah di Kabupaten Malang, seperti wisata alam, budaya, dan kuliner, dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menarik lebih banyak wisatawan domestik dan internasional. Pengembangan infrastruktur pariwisata, seperti hotel, restoran, dan transportasi, serta promosi destinasi wisata dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan di sektor jasa, perhotelan, pemandu wisata, dan industri kreatif.

Dengan mengintegrasikan pengembangan sektor-sektor ini, Pemerintah Kabupaten Malang dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang dinamis dan inklusif, tidak hanya mengurangi tingkat pengangguran tetapi juga

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Gambar 1. 2 10 Kota/Kabupaten dengan Jumlah Penduduk Tertinggi di Jawa Timur tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Selain permasalahan pengangguran, Kabupaten Malang menempati urutan kedua dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Timur dengan total penduduk sebanyak 2.885.900 jiwa, setelah Kota Surabaya, sehingga pertumbuhan jumlah populasi atau peningkatan jumlah penduduk memberikan dampak yang signifikan terkait masalah tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan meningkatnya persaingan tenaga kerja. Dengan jumlah penduduk yang berlebihan dapat berkontribusi pada tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Tingkat pertumbuhan dan struktur usia berdampak pada ketersediaan pekerjaan dan pengangguran. Kabupaten Malang terkenal dengan banyaknya

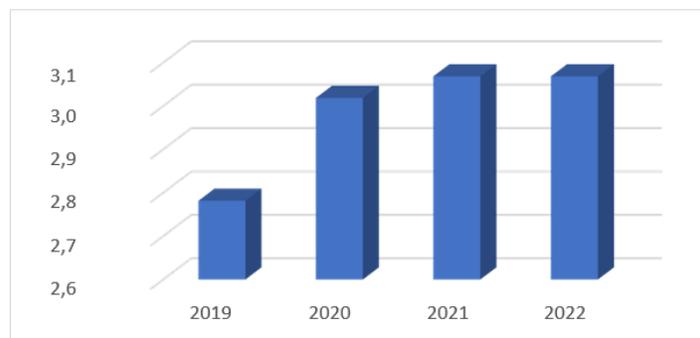
destinasi wisata, dapat memanfaatkan sektor pariwisata ini untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka di daerah tersebut. Dari banyak jumlah penduduk di Kabupaten Malang bisa berkontribusi untuk mengisi berbagai peluang kerja dapat tercipta, mulai dari sektor perhotelan, restoran, hingga jasa pemandu wisata. Tidak hanya menyerap tenaga kerja lokal, tetapi juga meningkatkan ekonomi daerah melalui peningkatan kunjungan wisatawan. Dengan demikian, potensi wisata yang besar di Kabupaten Malang dapat menjadi salah satu solusi efektif untuk mengurangi angka pengangguran terbuka.

Ketenagakerjaan masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Timur terkhusus Kabupaten Malang. Tenaga kerja, yang mencari sumber pendapatan, memperolehnya melalui pekerjaan dengan harapan mendapatkan upah dalam bentuk uang. Peran tenaga kerja menjadi krusial dalam aktivitas perekonomian, dan partisipasi mereka menentukan tingkat pendapatan lebih memadai. TPT di Kab Malang pada tahun 2022 terdapat 1.481.324 yang merupakan angkatan tenaga kerja dan 623.534 merupakan bukan tenaga kerja. Sehingga sebanyak 70,38% dari populasi usia kerja di Kabupaten Malang pada tahun 2022 terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan sehingga dapat dikatakan partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Malang cukup tinggi. Tetapi dari total tenaga kerja tersebut terdapat 97,319 jiwa atau 6,67 persen merupakan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Malang. Oleh karena itu, salah satu aspek yang perlu diperbaiki adalah penyerapan tenaga kerja (Sholeh, 2019) karena tingkat partisipasi angkatan kerja sangat penting untuk memahami pengangguran terbuka karena mencerminkan

proporsi orang yang aktif terlibat di pasar tenaga kerja. Tingkat partisipasi lebih tinggi menandakan angkatan kerja lebih banyak digunakan, sementara penurunan dapat mengindikasikan pengangguran tersembunyi atau kurangnya pemanfaatan sumber daya tenaga kerja. Secara keseluruhan, tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi di Kabupaten Malang dapat berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat pengangguran, terutama jika didukung oleh kebijakan yang tepat dan pengembangan sektor ekonomi potensial seperti pariwisata.

Terdapat beberapa faktor mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yaitu upah minimum. Upah merupakan imbalan yang diberikan kepada para pekerja dalam bentuk uang. Besar atau kecil tingkat upah oleh pemerintah akan berpengaruh pada permintaan penggunaan tenaga kerja. Menurut (Boedirochminarni, 2019) jika tingkat upah atau gaji dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan juga dapat meningkatkan semangat para pekerja. Upah minimum di Kabupaten Malang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Upah harus mencerminkan apa yang telah diberikan oleh pekerja kepada perusahaan. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Timur upah minimum Kabupaten Malang masih tergolong rendah. Menurut (Gregory & Zierahn, 2022) para pekerja yang mempunyai keterampilan dan pendidikan lebih memiliki peluang untuk mendapatkan upah tinggi.

Gambar 1. 3 Upah Minimum Kabupaten Malang, 2019-2022
(Dalam Juta)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang

Kondisi upah minimum Kabupaten Malang tahun 2022 terhadap pengangguran menunjukkan bahwa UMK tidak naik dari tahun lalu dan TPT meningkat, sehingga upah minimum memainkan peran penting dalam dinamika pasar kerja. Kenaikan upah minimum yang sesuai dengan inflasi dan biaya hidup dapat membantu mengurangi pengangguran dengan meningkatkan daya beli, produktivitas, dan investasi, serta kesejahteraan keseluruhan pekerja (Silvia Luthfiyah,2023). Sebaliknya, stagnasi upah minimum dapat memperburuk situasi pengangguran, seperti yang terlihat di Kabupaten Malang pada tahun 2022. Oleh sebab itu, penetapan upah minimum harus dilakukan dengan sangat cermat. Jika upah minimum ditetapkan terlalu tinggi melebihi produktivitas pekerja bisa menyebabkan pengangguran karena pemberi kerja tidak mampu membayar upah tersebut. Maka, perlu dicapai keseimbangan yang tepat untuk memastikan bahwa upah minimum dapat membantu mengurangi pengangguran tanpa merugikan pemberi kerja.

Secara keseluruhan, upah minimum yang efektif dapat menjadi alat

penting untuk mengurangi pengangguran terbuka jika ditetapkan pada tingkat yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan produktivitas tenaga kerja di suatu negara.

Kepadatan penduduk menimbulkan sejumlah masalah, terutama dalam sektor ekonomi dan sosial terkait masalah kemiskinan. Situasi ini terjadi karena jumlah penduduk terbilang besar tidak sejalan dengan upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memberikan lapangan pekerjaan memadai. Dengan demikian, dapat diamati bahwa tingkat pengangguran mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kenaikan dan penurunan angka pengangguran terbuka disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah tingkat pendidikan (Kaufman dkk 2019). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malang pada tahun 2022 mencapai 71,38 meningkat 0,78 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Dalam dimensi pengetahuan anak-anak usia 7 tahun ke atas memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,38 tahun (setara D1), sementara penduduk usia 25 tahun ke atas, secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,68 tahun (setara SMP kelas 1), kedua indikator masing-masing meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator antara lain Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2011 hingga 2022, harapan lama sekolah (HLS) Kabupaten Malang telah meningkat dari 10,78 tahun pada tahun 2011 menjadi 13,38 tahun pada tahun 2022, atau naik sebesar 2,6 poin selama 10 tahun.

Sementara itu, rata-rata lama sekolah (RLS) juga meningkat dari 6,35 tahun pada tahun 2011 menjadi 7,68 tahun pada tahun 2022, atau naik 1,33 poin selama 10 tahun. Ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Malang usia 25+ setara dengan tingkat pendidikan SMP kelas VII. Semakin membaiknya kondisi sosial dan ekonomi pasca pandemi dan strategi pemerintah dalam mempercepat pemulihan sosial ekonomi berdampak pada perbaikan kualitas kesehatan, pendidikan dan pengeluaran yang disesuaikan masyarakat Kabupaten Malang. Pendidikan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu, yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Pekerja berpendidikan cenderung memiliki keterampilan lebih tinggi dan lebih siap untuk menghadapi tantangan di pasar kerja, sehingga mengurangi risiko pengangguran.

Jika setiap individu bekerja maka akan terjadi pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan produktivitas pada masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu investasi manusia mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan, sehingga kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat. Semakin tinggi rata lama sekolah/pendidikan maka akan mempengaruhi atas kesejahteraan masyarakat. Selain itu, persyaratan kualifikasi tenaga kerja yang tinggi pada proses seleksi penerimaan perusahaan juga dapat menjadi beban bagi pekerja dengan keterampilan rendah, menyebabkan terjadinya pengangguran terbuka. Kabupaten Malang telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembangunan manusia, yang tercermin dalam peningkatan IPM. Namun, tantangan tetap ada terutama dalam hal pengangguran, kesenjangan pembangunan, dan peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.

Upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan bahwa semua warga Kabupaten Malang dapat menikmati manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Jumlah penduduk yang besar dapat mendukung pembangunan tersebut jika diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai, namun akan menyebabkan pengangguran jika tidak ada cukup kesempatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, namun manfaatnya tidak optimal jika tidak diiringi dengan kualitas pekerjaan yang baik. Kebijakan upah minimum yang tepat dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pekerja, tetapi jika tidak sesuai dengan kondisi pasar, bisa meningkatkan pengangguran terutama di sektor informal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi menunjukkan akses baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang layak, yang dapat mengurangi pengangguran. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk, partisipasi angkatan kerja, upah minimum, dan indeks pembangunan manusia terhadap pengangguran terbuka memberikan wawasan penting untuk menyusun kebijakan ekonomi dan sosial yang mendukung pembangunan dan mengurangi pengangguran. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah pengangguran, tetapi pengangguran terbuka masih saja terjadi. Atas dasar tersebut judul skripsi “ **Jumlah penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Malang**” untuk diteliti lebih lanjut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas dapat dirumuskan rumusan masalah yang ada diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Malang?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Malang?
3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Malang?
4. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Malang
3. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Malang
4. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Malang

1.4 Ruang Lingkup

Dalam sebuah penelitian, ruang lingkup memiliki peran penting dalam mengarahkan fokus penelitian digunakan untuk menguraikan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Malang. Penelitian ini mempergunakan jumlah penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum dan indeks pembangunan manusia sebagai variabel bebas (independent) serta tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel terikat (dependen) sebagai alat ukur dan metode analisis linier berganda dimanfaatkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Malang. Penelitian ini memakai data sekunder yang terdapat BPS Kabupaten Malang pada periode 2010 – 2023. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan memakai metode Analisis Regresi Linier Berganda.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti:

Penelitian ini memberikan kontribusi pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman melalui pengalaman dalam menulis karya ilmiah. Selain itu, penelitian ini juga menjadi landasan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Malang

2. Bagi Instansi:

Hasil penelitian ini memberikan informasi yang berharga sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengurangi permasalahan Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Malang